

CITA-CITA MENUJU MASYARAKAT MADANI, MUNGKINKAH ?

Oleh: Arie Supriyatno

Abstracts :

The results of this thinking to try to offer new concepts of civil society in terms of: ontology, axiology, and epistemology. Ontologically, civil society is a democratic society. In axiology, civil society aims to reduce the demands for reform both from within and outside the country. In addition, through civil society will arise educational innovations. In epistemology, civil society achieved through short-term goals and long term through the democratization of education. With the democratization of education will be the equality between educators and learners in the teaching-learning process. Educational innovation contexts democratization of education needs to address pragmatic issues so that students can not be separated from the culture and society.

Keywords: civil society, democratic society, educational innovation, educational democracy.

A. PENDAHULUAN

Cita-cita untuk mewujudkan masyarakat madani meniscayakan suatu upaya yang serius dan sistematis. Masyarakat madani bukan sekadar sistem, tetapi juga merupakan proses. Oleh karena itu, mewujudkan masyarakat madani memerlukan proses yang sistematis, dan salah tu proses yang paling strategis ialah melalui invasi pendidikan.

Masyarakat madani merupakan konsep yang kompleks, karena di dalamnya terkandung konsep relasi-relasi sosial yang beradab yang hendak ditransformasikan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Di dalamnya terdapat konsep masyarakat, hukum, demokrasi, pemerintahan dan kenegaraan, keterbukaan, perubahan sosial kebudayaan, dan lain-lain dalam relasi-relasi dan struktur sosial.

Kompleksitas konsep masyarakat madani ini perlu ditransformasikan dalam kehidupan masyarakat melalui pendidikan yang demokratis. Untuk mewujudkan masyarakat madani tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Namun, memerlukan proses panjang dan waktu dan waktu serta menuntut komitmen masing-masing warga negeri ini untuk mereformasi diri secara total dan konsisten dalam suatu perjuangan yang gigih.

Berbagai upaya perlu dilakukan dalam mewujudkan masyarakat madani, baik yang berjangka pendek maupun berjangka panjang. Untuk yang jangka pendek dilaksanakan dengan memilih dan menempatkan pemimpin-pemimpin yang dapat dipercaya (credible), dapat diterima (acceptable), dan dapat memimpin (capable). Sedangkan untuk jangka panjang antara lain adalah dengan menyiapkan sumber daya manusia yang berwawasan dan berperilaku madani melalui perspektif pendidikan. Perspektif pendidikan penting untuk dikaji mengingat konsep masyarakat madani sebenarnya merupakan bagian dari tujuan pendidikan nasional. Jadi pendidikan menjadi soko guru dalam mewujudkan cita-cita menuju masyarakat madani.

Penanaman nilai-nilai civil society melalui pendidikan agaknya semakin menemukan momentumnya dalam transisi menuju demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia. Sebab cara yang paling strategis untuk "mengalami demokrasi" ialah menyelenggarakan pendidikan yang di dalamnya terkandung upaya sosialisasi, diseminasi dan aktualisasi konsep, sistem, nilai, dan budaya demokrasi.

Penyebaran nilai-nilai tersebut melalui pendidikan demokratis semakin urgen

manakala bangsa ini mengalami krisis multi-dimensional yang berkepanjangan di tengah transisi sosial-politik menuju demokrasi. Urgensi ini terletak pada harapan terhadap generasi mendatang yang tumbuh dan berkembang melalui rahim pendidikan yang demokratis pula.

Urgensi dunia pendidikan dalam transisi sosial-politik menuju demokrasi itu juga semakin disadari dan diimplementasikan banyak pihak, terutama dalam mempersiapkan anak didik menghadapi fenomena perubahan sosial pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

Penyeragaman pendidikan secara nasional (untuk kepentingan politik kekuasaan) di masa lalu menyebabkan dunia pendidikan menjadi mandul dan tidak partisipatif terhadap problem-problem lokal, di samping juga kurang antisipatif terhadap perubahan sosial dalam skala global yang mengusung isu-isu pluralisme, demokrasi, dan hak asasi manusia. Hal itu mengakibatkan lulusan yang dihasilkan belum sepenuhnya mencerminkan perilaku-perilaku yang diharapkan oleh tujuan nasional tersebut sehingga timbullah gagasan untuk membentuk masyarakat madani termasuk di masyarakat kampus.

Oleh karena itu, kini dunia pendidikan benar-benar dituntut perannya untuk menumbuhkan dan mengembangkan budaya madani merupakan modal dasar untuk mewujudkan dan menegakkan demokrasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Mengingat Indonesia yang sedang tumbuh menuju demokrasi, peran bidang pendidikan semakin penting. Sebab, menumbuhkan dan mengembangkan budaya madani membutuhkan upaya yang sistematis dan integral agar generasi muda yang tumbuh dan berkembang dalam rahim pendidikan dapat benar-benar "mengalami demokrasi" setelah tahu dan sadar tentang pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menyangga, memelihara, dan melestarikan demokrasi dalam rangka menuju cita-cita masyarakat madani.

Sejak digulirkan istilah "masyarakat madani" (al-mujtama' al-madani), pada tahun 1995 oleh Datuk Anwar Ibrahim, mantan Deputy Perdana Menteri Malaysia, yang kemudian diikuti oleh Nurcholis Madjid (Chamim, dkk, 2003:47), sejak itu pula upaya untuk mewujudkan masyarakat madani telah "menggoda" dan memotivasi para pakar pendidikan untuk menata dan mencari masukkan guna mewujudkan cita-cita menuju masyarakat madani yang dimaksud. Dalam hal ini Hefner (1998:1) menyatakan bahwa masyarakat madani adalah sebuah impian (dream) suatu komunitas tertentu. Oleh karena itu, Hefner meragukan upaya bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita masyarakat madani yang diharapkannya, karena formatnyapun belum jelas.

Selain menjadi isu penting dalam gerakan Islam di Indonesia, pada saat yang sama telah menjadi wacana akademik yang cukup menarik di kampus-kampus dalam beberapa tahun terakhir ini. Perdebatanpun masih terus mewarnai diskusi atau wacana tentang konsep masyarakat madani tersebut. Pada tingkat konseptual masih diperdebatkan apakah istilah "masyarakat madani" itu sama (identik, sepadan) dengan konsep "masyarakat Islam", "masyarakat utama", dan lebih luas lagi dengan "civil society" (masyarakat warga, masyarakat sipil, masyarakat beradab) yang telah lama diperbincangkan dalam wacana akademik. Terlepas dari persamaan atau perbedaannya, secara konseptual apa karakteristik masyarakat madani itu?

Senada dengan pendapat Hefner tersebut, Mulder (1999:97) memberikan dugaan bahwa Indonesia masih akan jauh dari pembentukan masyarakat madani karena demokratisasi pendidikan belum berjalan lancar, sistem pendidikannya masih menerapkan aspirasi kemajuan peserta didik secara memadai. Jika reformasi dan inovasi pendidikan memang mendesak untuk dilakukan dan agar kita memiliki andil dalam membentuk dan menghadapi masyarakat madani, maka permasalahannya antara lain adalah, "sampai sejauh maa

pemahaman kita tentang makna masyarakat madani (ontologinya)?, nilai-nilai manfaat apa yang diperoleh dengan terbentuknya masyarakat madani (aksiologinya)?, dan bagaimana pemecahan masalahnya atau bagaimana cara melaksanakan demokratisasi pendidikan untuk mewujudkan masyarakat madani (epistemologinya)?, bagaimanakah arah reformasi dan inovasi pendidikan harus dilakukan ?, bagaimanakah agar demokratisasi pendidikan itu berjalan mulus tanpa hambatan dan penyimpangan?, bagaimana kekuasaan dan kepentingan pribadi atau golongan tidak menggoda untuk menund demokratisasi pendidikan?

Mengingat banyaknya masalah yang dihadapi dalam mewujudkan cita-cita menuju masyarakat madani, maka pada kesempatan ini pembahasan penulis batasi pada apakah makna masyarakat madani itu? apakah manfaat mewujudkan cita-cita menuju masyarakat madani itu?, dan bagaimana cara mewujudkan cita-cita menuju masyarakat madani melalui pendidikan demokratisasi pendidikan?

Penulis mencoba mengungkapkan pemikiran yang menawarkan konsep-konsep baru masyarakat madani yang mungkin dapat dijadikan masukan dalam mewujudkan masyarakat madani melalui perspektif pendidikan. Tentu saja pemikiran konseptual ini akan dapat dioperasionalkan di lapangan secara kontekstual setelah melalui pengujian empiris yang profesional.

B. PEMBAHASAN

Seligman seperti dikutip Mun'im (1994:6) mendefinisikan istilah *civil society* sebagai perangkat gagasan etis yang mengejawentah dalam berbagai tatanan sosial, dan yang paling penting dari gagasan ini adalah usahanya untuk menyelaraskan berbagai konflik kepentingan antar individu, masyarakat dan negara.

Sedangkan *civil society* menurut Havel seperti yang dikutip Hikam (1994:6) ialah rakyat sebagai warga negara yang mampu belajar tentang aturan-aturan main melalui

dialog demokratis dan penciptaan bersama batang tubuh politik partisipatoris yang murni. Gerakan pengutn *civil society* merupakan gerakan untuk merekonstruks ikatan solidaritas dalam masyarakat yang telah hancur akibat kekuasaan yang monolitik. Secara normatif-politis, inti strategi ini adalah usaha untuk memulihkan kembali pemahaman asasi bahwa rakyat sebagai warga negara memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban kepada para penguasa atas segala yang mereka lakukan atas nama pemerintah.

Gellner (1995:2) menyatakan bahwa masyarakat madani ak terwujud manakala terjadi tatanan masyarakat yang harmonis, yang bebas dari eksploitasi dan penindasan. Pendek kata, masyarakat madani ialah kondisi sua komunitas yang jauh dari monopoli kebenaran dan kekuasaan.

Kebenaran dan kekuasaan adalah milik bersama. Stiap anggota masyarakat madani tidak bisa ditekan, ditakut-takuti, dicekal, diganggu kebebasannya, semakin dijauhkan dari demokrasi, dan sejenisnya. Oleh karena itu perjuangan menuju cita-cita masyarakat madani pada hakekatnya merupakan proses panjang dan produk sejarah yang abadi dan perjuangan melawan kezaliman dan dominasi para penguasa menjadi ciri utama masyarakat mani.

Perjuangan masyarakat madani di Indonesia pada awal pergerakan kebangsaan dipelopori oleh Syarikat Islam (1912) dan dilanjutkan oleh Sutan Syahrir ternayata harus menghadapikekuatan represif baik dari rezim Orde Lama di bawah pimpinan Soekarno maupun rezim Orde Baru di bawah pimpinan Soearto, tuntutan perjuangan transformasi menuju masyarakat madani pa era reformasi ini tampaknya sudah tak terbendung lagi dengan tokoh utamanya adalah Amien Rais dari UGM Yogyakarta.

Gellner seperti yang dikutip Muhasin (1995:ix) menyatakan bahwa masyarakat madani sebagai terjemahan bahasa ggris, *civil society*. Kata *civil society* sebenarndari bahasa Latin yaitu *civitas dei* yang artinya kota Illahi dan *society* yang berarti masyarakat.

Dari kata *civil* akhirnya membentuk kata *civilization* yang berarti peradaban. Oleh sebab itu, kata *civil society* dapat diartikan sebagai komunitas masyarakat kota yaitu masyarakat yang telah berperadaban maju.

Konsepsi seperti ini menurut Madjid seperti yang dikutip Mahasin (1995:x) pada awalnya lebih merujuk pada dunia Islam yang ditunjukkan oleh masyarakat kota Madinah. Sebaliknya, lawan dari kata atau istilah masyarakat nonmadani adalah kaum pengembara, badawah, yang masih membawa citranya yang kasar, berwawasan pengetahuan yang sempit, masyarakat puritan, tradisional penuh mitos dan takhayul, banyak memainkan kekuasaan dan kekuatan, sering dan suka menindas, dan sifat-sifat negatif lainnya.

Keadaan masyarakat nonmadani ini menurut Suwardi (1999:67) seperti ditunjukkan oleh perilaku manusia Orde Baru yakni pada saat itu ada mitos bahwa Soeharto saja yang mampu memimpin bangsa dan menggunakan kekuatan ABRI untuk mempertahankan status quo. Lebih lanjut ditamkan oleh Suwardi (1999:67) untuk mempertahankan status quo. Lebih lanjut ditambahkan oleh Suwardi (1999:67) bahwa ada satu hak yang perlu dipahami yaitu masyarakat madani bukanlah masyarakat yang bebas dari senjata atau ABRI (sekarang TNI); *civil society* tidak berkalikan dengan masyarakat pimpinan TNI seperti yang banyak diasumsikan orang awam.

Raharjo (1997:17-24) menyatakan bahwa masyarakat madani merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, *civil society*. Istilah *civil society* sudah ada sejak Sebelum Masehi. Orang yang mencetuskan istilah *civil society* ialah Cicero (106-43 SM), sebagai orator Yunani Kuno. *Civil society* menurut Cicero ialah suatu komunitas politik yang beradab seperti yang dicontohkan masyarakat kota yang memiliki kode hukum sendiri. Dengan konsep *civility* (kewargaan) dan *urbanity* (budaya kota), maka kota difahami bukan hanya sekedar konsentrasi penduduk, melainkan juga sebagai pusat peradaban dan kebudayaan.

Istilah madani menurut Munawir (1997:1320) sebenarnya berasal dari bahasa Arab, *madaniy*. Kata *madaniy* berakar dari kata kerja *madana* yang berarti mendiami, tinggal atau membangun. Kemudian berubah istilah menjadi *madaniy* yang artinya beradab, orang kota, orang sipil, dan yang bersifat sipil atau perdata. Dengan demikian, istilah *madaniy* dalam bahasa Arabnya mempunyai banyak arti. Konsep masyarakat madani menurut Madjid (1997:294) kerap kali dipandang telah berjasa dalam menghadapi rancangan kekuasaan otoriter dan menentang pemerintahan yang sewenang-wenang di Amerika Latin, Eropa Selatan, dan Eropa Timur.

Hall (1998:1) menyatakan bahwa masyarakat madani identik dengan *civil society*, artinya suatu gagasan, angan-angan, bayangan, cita-cita suatu komunitas yang dapat terejawantahkan ke dalam kehidupan sosial. Dalam masyarakat madani, perilaku sosial akan berpegang teguh pada peradaban dan kemanusiaan. Hefner (1998:16-20) menyatakan bahwa masyarakat madani merupakan masyarakat modern yang bercirikan kebebasan dan demokratisasi dalam berinteraksi dalam masyarakat yang semakin plural dan heterogen. Dalam keadaan seperti ini, masyarakat diharapkan mampu mengorganisasikan dirinya dan tumbuh kesadaran diri dalam mewujudkan peradaban. Mereka akhirnya mampu mengatasi dalam kondisi global, kompleks, penuh persaingan dan perbedaan.

Masyarakat madani menurut Rahardjo seperti yang dikutip Nurhadi (1999:9) ialah masyarakat yang beradab. Istilah masyarakat madani selain mengacu pada konsep *civil society* juga berdasarkan pada konsep negara kota Madinah yang dibangun Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 M. Masyarakat madani juga mengacu pada konsep *tamadhun* (masyarakat yang berperadaban) yang diperkenalkan oleh Ibn Khaldun dan konsep Al Madinah al Fadhilah (Madinah sebagai Negara Utama) yang diungkapkan oleh filsuf Al Farabi pada abad pertengahan.

Dalam memasuki milenium III, tuntutan masyarakat madani di dalam negeri oleh kaum reformis yang anti status quo menjadi semakin besar. Masyarakat madani yang mereka harapkan adalah masyarakat yang lebih terbuka, pluralistik, dan desentralistik dengan partisipasi politik yang lebih besar (Nordholt, 1999:16), jujur, adil, mandiri, harmonis, memihak yang lemah, mejamin kebebasan beragama, berbicara, berserikat dan berekspresi, menjamin hak kepemilikan dan menghormati hak-hak asasi manusia (Farkan, 1999:4).

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat madani pada prinsipnya memiliki makna ganda yaitu: demokrasi, transparansi, toleransi, potensi, aspirasi, motivasi, partisipasi, konsistensi, komparasi, koordinasi, simplifikasi, sinkronisasi, integrasi, emansipasi, dan hak asasi, namun yang paling dominan adalah masyarakat yang deokratis.

Perbedaan yang tampak jelas adalah civil society tidak mengaitkan prinsip tatanannya pada agama tertentu, sedangkan masyarakat madani (al-madaniy) jelas mengacu pada agama Islam. Konsep masyarakat madani menurut Islam adalah bangunan politik yang demokratis, partisipatoris, menghormati dan menghargai publik seperti: kebebasan hak asasi, partisipasi, keadilan sosial, menjunjung tinggi etika dan moralitas, dan lain sebagainya. Dengan mengetahui makna madani secara mudah dapat dipahami sebagai masyarakat yang beradab, masyarakat sipil, dan masyarakat yang tinggal disuatu kota atau berpaham masyarakat kota yang pluralistik.

Manfaat yang diperoleh dengan terwujudnya masyarakat madani ialah terciptanya masyarakat Indonesia yang demokratis sebagai salah satu tuntutan reformasi di dalam negeri dan tekanan-tekanan politik dan ekonomi dari luar negeri. Di samping itu, menurut Suwardi (1999:66) melalui masyarakat madani akan mendorong munculnya inovasi-inovasi baru di bidang pendidikan. Selanjutnya, ditambahkan oleh Daliman (1999:78-79) bahwa dengan

terwujudnya masyarakat madani, maka persoalan-persoalan besar bangsa Indonesia seperti: konflik-konflik suku, agama, ras, etnik, golongan, kesenjangan sosial, kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan pembagian "kue bangsa" antara pusat dan daerah, saling curiga serta ketidakharmonisan pergaulan antar warga dan lain-lain yang selama Orde Baru lebih banyak ditutup-tutupi, direayasa dan dicairkan kambing hitamnya; diharapkan dapat diselesaikan secara arif terbuka, tuntas dan melegakan semua pihak, suatu prakondisi untuk dapat mewujudkan kesejahteraan lahir batin bagi seluruh rakyat. Dengan demikian, kekhawatiran akan terjadinya disintegrasi bangsa dapat dicegah.

Guna mewujudkan cita-cita menuju masyarakat madani dibutuhkan motivasi yang tinggi dan partisipasi nyata dari individu sebagai anggota masyarakat. Hal ini mendukung pendapat Suryadi (1999:23) dan Daliman (1999:78) yang intinya menyatakan bahwa serta dituntut komitmen masing-masing warganya untuk mereformasi diri secara total dan selalu konsisten dan penuh kearifan dalam menyikapi konflik yang tak terelakan. Tuntutan terhadap aspek ini sama pentingnya dengan kebutuhan akan toleransi sebagai instrumen dasar lahirnya sebuah konsensus atau kompromi.

Ciri utama masyarakat madani adalah demokrasi. Demokrasi memiliki konsekuensi luas diantaranya menuntut kemampuan partisipasi masyarakat dalam sistem politik dengan organisasi-organisasi politik yang independen sehingga memungkinkan kontrol aktif dan efektif dari masyarakat terhadap pemerintah dan pembangunan, dan sekaligus masyarakat sebagai pelaku ekonomi pasar. Bila masyarakat Indonesia tidak demokratis, maka Indonesia akan mendapat tekanan-tekanan politik dari kaum reformis di dalam negeri.

Di lain pihak dari luar negeri, Indonesia akan mendapat tekanan-tekanan politik dan ekonomi dari PBB, Bank Dunia, IMF, dan negara-negara penganut paham demokratis. Sementara ini, ekonomi kita masih sangat bergantung pada pinjaman Bank Dunia